



EDISI JUMAT 27 FEBRUARI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02

GOVERNMENTTODAY
Babak Baru Polemik LPDP
Kementerian Hukum: Anak DS Masih WNI

04

NUSANTARA
Kasus Korupsi Minyak Pertamina
3 Eks Bos Pertamina Divonis 9-10 Tahun,

10

LISTSTYLE
Yang Sedang Viral, Gamis 'Bini Orang' Diburu
untuk Lebaran

MATI LAMPU NASIONAL BAYANGI RI Stok Batu Bara Menipis, Tersisa 10 Hari

Kabar mengejutkan datang dari sektor kelistrikan Indonesia. Rata-rata hari operasi produksi (HOP) batu bara untuk pembangkit saat ini berada di level 10 hari operasi. Padahal, idealnya HOP batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di level 25 hari operasi. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memangkas kuota produksi batu bara tahun ini menjadi 600 juta ton. Diketahui, data terbaru menunjukkan terdapat sekitar 265 unit PLTU yang beroperasi, dengan kapasitas total men-capai 54,68 gigawatt (GW). Menanggapi hal itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin stok batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), khususnya pembangkit listrik. Waspada mati lampu skala nasional. **BACA HAL 11...**

Faktor Penyebab Kenaikan



Peningkatan Kapasitas

Kapasitas PLTU di Indonesia telah meningkat 6,5 kali lipat sejak tahun 2000 hingga 2024. Per 2024, terdapat 254 unit PLTU yang beroperasi di seluruh Indonesia.



Konsumsi Listrik:

Realisasi konsumsi listrik per kapita terus melonjak, dari 1.084 kWh pada 2019 menjadi 1.411 kWh pada 2024.



Proyek Baru:

Kementerian ESDM memastikan tambahan kapasitas PLTU sebesar 3,2 GW akan mulai beroperasi pada tahun 2025, yang akan menambah beban kebutuhan batubara domestik

Kebutuhan dan konsumsi batubara PLTU

2025 (Target/Proyeksi)

Pemerintah menargetkan kebutuhan batubara domestik, yang mayoritas diserap sektor kelistrikan, mencapai 208,5 juta ton. Hingga semester I 2025, realisasi produksi nasional tetap terjaga untuk memenuhi target tahunan sebesar 739,6 juta ton.

2024 (Realisasi)

Pemanfaatan batubara domestik mencapai 233 juta ton. Konsumsi akhir batubara nasional pada tahun ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam sedekade terakhir.

2023 (Realisasi)

Kebutuhan khusus untuk PT PLN (Persero) mencapai 161,2 juta ton. Pada tahun ini, batubara masih mendominasi bauran energi nasional sebesar 40,46%.

2022

Kebutuhan batubara untuk PLTU diperkirakan mencapai kisaran 130 juta ton pertahun.

FAKTA-FAKTA KEBUTUHAN BATU BARA UNTUK SEKTOR KETENAGALISTRIKAN (PLTU) DI INDONESIA

2021

Kebutuhan diperkirakan berada di angka 113 juta ton.

2019

Kebutuhan batubara untuk PLTU PLN tercatat sebesar 96 juta ton.

Berbagai Sumber diolah

PLTU Tanjung Jati B berkapasitas total lebih dari 4.000 MW yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah. (Dok.lensajepara)

Babak Baru Polemik LPDP

KEMENTERIAN HUKUM: ANAK DS MASIH WNI

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan anak dari alumni LPDP berinisial DS, yang menuai polemik setelah pernyataan “cukup saya yang WNI, anak jangan”, hingga kini tetap berstatus warga negara Indonesia. Bahkan ditegaskan, dugaan adanya upaya pengalihan status kewarganegaraan anak sejak usia dini dinilai berpotensi melanggar hak perlindungan anak.

Direktur Jenderal AHU, Widodo, menjelaskan bahwa anak tersebut lahir di Inggris, namun negara itu tidak menganut *ius soli* atau kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Karena itu, kelahiran di Inggris tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai warga negara Inggris.

“Inggris termasuk negara yang tidak menganut *ius soli*, tidak berdasarkan garis tempat kelahiran,” ujar Widodo dalam konferensi pers di kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

Ia menyatakan, baik DS, suaminya, maupun anak mereka masih tercatat sebagai WNI. Menurut Widodo, status kewarganegaraan anak mengikuti garis keturunan orang tuanya. Ia juga menyinggung dugaan adanya upaya pengalihan status kewarganegaraan anak sejak usia dini yang dinilai berpotensi melanggar hak perlindungan anak.

“Anaknya masih relatif kecil, belum dewasa. Kalau dilihat dari garis keturunan dan orang tuanya, tentu masih berstatus warga negara Indonesia. Tapi oleh orang tuanya diinformasikan seolah-olah menjadi



warga negara asing. Ini tentu bisa melanggar hak perlindungan anak,” katanya.

Meski demikian, Widodo membuka kemungkinan adanya skema permanent resident di Inggris yang dalam jangka waktu tertentu dapat membuka peluang kewarganegaraan. Namun, mekanisme tersebut umumnya berlaku bagi orang dewasa dan harus memenuhi syarat tinggal berturut-turut selama lima tahun.

“Secara aturan perundang-

undangan, karena orang tuanya WNI, otomatis anaknya WNI. Kalau pun ada sistem permanent resident, itu biasanya untuk orang dewasa. Ini yang sedang kami konfirmasi,” ucapnya.

Hingga saat ini, Ditjen AHU belum berkoordinasi langsung dengan DS maupun keluarganya. Kementerian Hukum, kata Widodo, akan berkomunikasi aktif dengan Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar Inggris untuk memastikan status kewarganegaraan

ESTIMASI BESARAN NOMINAL DANA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) YANG HARUS DIKEMBALIKAN

Komponen dan Estimasi:

- Biaya Kuliah (Tuition Fee)
Rp380 juta – Rp665 juta
- Biaya Hidup (Living Allowance)
Rp32 juta x 12 = Rp384 juta
- Dana Kedatangan (Settlement)
Rp32 juta x 2 = Rp64 juta
- Asuransi Kesehatan (Health)
Rp29 juta/tahun
- Tunjangan Buku (Book Allowance)
Rp10 juta/tahun
- Tunjangan Tesis (Research Grant)
Rp50 juta (maksimal)
- Transportasi (ID–UK Flight)
Rp20 juta – Rp30 juta
- Visa (UK Student Visa + IHS surcharge)
Rp15 juta – Rp20 juta

Jika dihitung seperti utang negara dengan bunga konservatif 6% per tahun dan sudah lewat misalnya 5 tahun:

Rp1,1 miliar x 6% x 5 tahun = Rp330 juta bunga

Jadi yang perlu dikembalikan DS & suami ke negara totalnya:

± Rp1,4 miliar x 2 = Rp2,8 miliar



yang bersangkutan.

“Sampai sekarang belum ada komunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Kami akan berkoordinasi dengan Kemlu dan Kedubes terkait status tersebut,” ujarnya.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan yang baru. Regulasi ini dirancang untuk memperketat persyaratan memperoleh maupun kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). (wid,ist,kum/dya)

Dirut LPDP: Orang Kaya Pilih Skema Beasiswa Partial Funding

DIREKTUR Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, menyarankan keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi agar tidak mengambil skema beasiswa penuh (*full funding*). Ia mendorong kelompok tersebut memilih skema *partial funding*, yakni pembiayaan bersama antara penerima dan LPDP.

Dalam skema ini, separuh biaya studi ditanggung oleh LPDP dan separuh lainnya dibiayai secara mandiri oleh penerima. “Kalau bapak atau ibu mampu, pilihlah yang bukan *full funding*, tetapi *partial funding*. Lima puluh persen dari LPDP, lima puluh persen dari Anda sendiri,” ujar Sudarto saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta.

Menurut dia, pola pembiayaan campuran itu dimaksudkan untuk memperluas jangkauan penerima beasiswa. Dengan adanya kontribusi mandiri dari keluarga mampu, dana LPDP bisa dialokasikan kepada lebih

banyak talenta Indonesia.

Sudarto menekankan, jumlah penerima beasiswa LPDP saat ini masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan pendidikan tinggi nasional. Karena itu, LPDP diarahkan untuk menjaring talenta terbaik (*top of the top*) agar dapat menempuh studi di perguruan tinggi kelas dunia.

Meski demikian, ia memastikan prinsip inklusivitas tetap dijaga. Dalam tiga tahun terakhir, sekitar 30 persen penerima berasal dari jalur afirmasi, mencakup wilayah 3T, keluarga prasejahtera, penyandang disabilitas, serta atlet berprestasi.

Bagi kelompok afirmasi tersebut, LPDP memberikan sejumlah relaksasi persyaratan, seperti standar kemampuan bahasa Inggris, indeks prestasi kumulatif, hingga batas usia. “Kami sadar banyak yang bagus, tetapi tidak punya kesempatan yang sama dibandingkan teman-teman di kota atau dari keluarga mampu,” kata Sudarto.

Selain mendorong skema *partial*

funding, LPDP juga memperluas kerja sama dengan sejumlah universitas ternama di negara-negara nonbahasa Inggris, seperti Jerman, Prancis, Cina, Jepang, Korea, dan Rusia. Biaya pendidikan di negara-negara itu dinilai relatif lebih terjangkau sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penerima beasiswa.

Sudarto menilai, penyebaran *awardee* ke berbagai negara juga penting untuk memperkaya kemampuan bahasa serta memperluas jejaring diaspora Indonesia. “Ke depan kita butuh anak-anak yang menguasai bahasa Jepang, Korea, Cina, Rusia, Prancis, dan Jerman. Itu penting untuk interaksi global Indonesia,” ujarnya.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan empat alumni yang dikenai sanksi akibat terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdikan di Indonesia telah mengembalikan dana sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. (rin,ant,ist/dya)

Gaduh MBG Pakai Dana Pendidikan

DPR NILAI STRATEGI CERDAS, MINTA PENGAWASAN DIPERKETAT

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan sebagian alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 dinilai sebagai strategi kebijakan yang sah dan layak diapresiasi. Di parlemen, kebijakan itu disebut sebagai bentuk *cross cutting policy*. Di lapangan, pengawasan pelaksanaan diminta diperketat agar standar mutu tetap terjaga.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan tidak ada kekeliruan dalam penganggaran MBG yang beririsan dengan anggaran pendidikan. Pernyataan itu disampaikan menyusul kritik terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp 769 triliun, dengan porsi sekitar Rp 223,5 triliun untuk MBG.

"Masyarakat harus dibangun pemahamannya bahwa penerima manfaat dari MBG yang ditargetkan mencapai hampir 84 juta yang terbesar adalah anak-anak dan siswa sekolah di seluruh Indonesia," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme tersebut tidak bertentangan karena dalam program MBG terjadi *cross cutting policy* dari sisi kebijakan anggaran. Strategi yang digunakan adalah membagi fungsi anggaran sesuai penerima manfaat untuk memperkuat fungsi belanja negara.

"Ini dalam kaitan follow the program yaitu anggaran mengikuti



fungsi dan peran programnya karena fungsinya adalah memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka adalah anak-anak dalam range umur siswa sekolah," tegasnya.

Menurut Misbakhun, pengalokasian anggaran untuk MBG sepenuhnya merupakan strategi kebijakan. Ketika pemerintah ingin memperbesar jumlah dan memperkuat penerima manfaat, maka

strategi alokasi dilakukan melalui pendekatan *cross cutting budget policy*.

"Sebagai strategi alokasi maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah sebagai pemilik mandat mengoperasikan APBN," ujarnya.

Ia bahkan menilai strategi tersebut

semestinya diapresiasi. "Seharusnya strategi anggaran ini justru diberikan pujian sebagai strategi yang cerdas bukan malah dipermasalahkan dan dipolitisasi sebagai miss alokasi anggaran," tuturnya.

Misbakhun juga menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan setiap tahun terus meningkat sesuai amanat konstitusi sebesar 20% dari total belanja APBN. Karena volume APBN naik setiap tahun, maka anggaran pendidikan pun ikut meningkat. Ia menilai tidak proporsional membenturkan sebagian alokasi untuk MBG dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendidikan. (wid ist/dya)

UPDATE KASUS DUGAAN KERACUNAN MBG (PEKAN TERAKHIR FEBRUARI 2026)

1. Lokasi & Skala Kejadian

- Cimahi, Jawa Barat (25 Feb): 24+ korban (Siswa & Guru TK-SMP).
- Dairi, Sumatra Utara: 280 siswa (SMK HKBP & SMK Arina).
- Penajam Paser Utara, Kaltim: 25 siswa (SDN 008 Waru).
- Ketapang, Kalbar: 340 korban (Kecamatan Marau).

2. Gejala Umum Korban

- Mual dan pusing hebat.
- Muntah-muntah.
- Nyeri ulu hati/perut melilit.

3. Menu yang Dicurigai

- Cimahi: Nasi onigiri & telur (diduga kurang matang).
- Dairi: Ayam gulai & ikan goreng (positif cemaran mikrobiologi).
- Kudus: Soto ayam suwir



Keracunan hingga Keluhan Menu Masih Bermunculan



Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berada dalam pusaran kritik. Di satu sisi, keluhan mengenai komposisi menu dan transparansi harga mencuat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, dugaan keracunan massal terjadi di sejumlah daerah, memaksa penghentian operasional dapur penyedia.

Di Yogyakarta, protes soal menu MBG selama Ramadan sampai ke meja Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ia meminta evaluasi menyeluruh sekaligus

transparansi harga setiap item makanan agar polemik tak berulang.

"Saya sudah minta Sekda untuk memanggil penanggungjawab MBG, karena ada yang protes untuk materinya [menu] kurang pas," ujar Sultan di Kepatihan, Kamis (26/2/2026).

Menurut dia, komposisi menu perlu diperbaiki dan harga setiap komponen mesti dicantumkan secara terbuka. "Misalnya dikasih pisang, harganya berapa. Sehingga clear. Sehingga jangan ada lagi pertanyaan yang bagi semua pihak tidak nyaman," katanya.

Selama Ramadan, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyalurkan paket MBG dalam bentuk makanan kering. Namun, sebagian orang tua menilai menu itu belum memadai.

Dian, orang tua siswa di Sleman, menyebut anaknya menerima paket berisi roti, kurma, dan susu kotak. Ia mempertanyakan ketiadaan sumber protein. "Ketiga item itu apa sudah sesuai, saya juga kurang paham. Cuma yang jadi pertanyaan saya apa itu sudah memenuhi gizi anak?" katanya.

Kritik juga datang dari aktivis antikorupsi Jogja, Baharuddin Kamba. Ia mendesak seluruh SPPG melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait kandungan gizi dan kewajaran harga paket makanan selama Ramadan.

"Terutama dalam hal menu kering selama bulan Ramadan, kandungan gizi serta kewajaran dari harga yang diterima oleh para siswa," paparnya. Ia mengingatkan kenaikan harga bahan pokok tak boleh dijadikan alasan menurunkan kualitas gizi maupun harga dalam program.

"Kenaikan harga bahan pokok

selama bulan Ramadan menjadi tantangan tersendiri. Namun ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas gizi termasuk harga dalam program MBG," tegasnya.

Sorotan terhadap kualitas dan tata kelola itu muncul bersamaan dengan laporan dugaan keracunan di berbagai daerah. (wid,ist,ant/dya)

Kasus Korupsi Minyak Pertamina

3 EKS BOS PERTAMINA DIVONIS 9-10 TAHUN

Sidang yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026), menjadi penutup babak pertama perkara besar tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. Riva dan Maya masing-masing divonis 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Sementara Edward dijatuhi hukuman lebih berat, 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar. Seme6, Anak juragan minyak mentah Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza divonis bersalah dengan hukuman 18 tahun bui.

Majelis hakim yang dipimpin Fajar Kusuma Aji menjatuhkan vonis kepada tiga terdakwa klaster pertama: Riva Siahaan selaku eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusuma selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne selaku eks VP Trading Operations.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda Rp1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” ujar Fajar dalam amar putusannya.

Untuk Edward Corne, hakim menyatakan, “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edward Corne dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda Rp1 miliar.”

Ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer.

Majelis menetapkan denda Rp1 miliar wajib dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan satu bulan. Jika tidak dibayar, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi, diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari total pidana. Status ketiganya tetap ditahan. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa terhadap Riva yang sebelumnya meminta 14 tahun penjara.

Jejak Kecurangan

Perkara ini bermula dari kebijakan prioritas pemenuhan minyak mentah dalam negeri pada periode 2018–2023. Pemerintah mewajibkan pemanfaatan pasokan domestik sebelum impor.

Namun, penyidik Kejaksaan Agung menduga terjadi pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir sehingga produksi kilang diturunkan.

Akibatnya, minyak bumi dalam negeri tidak terserap dan kebutuhan dipenuhi lewat impor.

Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar menyebut terdapat kesepakatan harga dan pengaturan pemenang melalui broker. Bahkan, diduga terjadi kebocoran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar



Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Riva Siahaan, menangis sebelum sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026). (ant)

perusahaan tertentu dapat menyesuaikan penawaran.

Selain itu, muncul dugaan pembelian RON 90 (setara Peralite) yang kemudian diolah menjadi RON 92 (Pertamax), serta mark up kontrak pengiriman minyak impor sebesar 13–15%. Kerugian negara dalam konstruksi perkara ini disebut mencapai Rp193,7 triliun. Dalam dakwaan lain, nilainya bahkan disebut menyentuh Rp285 triliun.

Secara keseluruhan, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka, terdiri dari pejabat subholding Pertamina dan pihak swasta.

Anak juragan minyak mentah Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza divonis bersalah melakukan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018–2023 yang merugikan negara hingga Rp285,18 triliun (wid,ist,kum/dya)

Hakim Tetapkan Kerugian Negara Rp9,4 Triliun

MAJELIS Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mencapai Rp9,4 triliun. Angka tersebut ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Berdasarkan laporan BPK RI terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam tata kelola minyak Kementerian ESDM, ditemukan kerugian pada PT Pertamina sebesar Rp2,5 triliun. Angka ini merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara dalam penjualan solar non-subsidi PT Pertamina dan PT PPN periode 2018–2023 yang secara keseluruhan mencapai Rp9,41 triliun,” ujar Hakim Anggota Sigit Herman Binaji saat

membacakan putusan, Kamis (26/2/2026).

Namun, majelis hakim menolak dalil mengenai kerugian perekonomian negara sebesar Rp171 triliun yang diajukan oleh tim ahli lainnya. Hakim menilai perhitungan tersebut masih bersifat asumsi dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat.

“Majelis hakim berpendapat bahwa perhitungan kerugian perekonomian negara yang disampaikan ahli Nailul Huda dan Wiko Saputra masih bersifat asumsi. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi sehingga hasilnya tidak pasti dan tidak nyata. Oleh karena itu, kerugian perekonomian negara tersebut dinyatakan belum terbukti secara hukum,” jelas Sigit.

Hakim menegaskan bahwa

DETAIL PUTUSAN KETIGA TERDAKWA

Terdakwa: Riva Siahaan

- **Status:** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Dakwaan Primer).
- **Vonis Penjara:** 9 tahun.
- **Vonis Denda:** Rp1 Miliar.
- **Ketentuan Denda:**
 - Wajib dibayar dalam 1 bulan (dapat diperpanjang maks. 1 bulan) setelah putusan.
 - Jika tidak dibayar, harta benda disita dan dilelang.
 - Jika harta tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 190 hari.
- **Masa Tahanan:** Dikurangkan dari total pidana.
- **Status Penahanan:** Tetap ditahan.

Terdakwa: Maya Kusuma

- **Status:** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Dakwaan Primer).
- **Vonis Penjara:** 9 tahun.
- **Vonis Denda:** Rp1 Miliar.
- **Ketentuan Denda:**
 - Sama dengan terdakwa Riva (Sita aset atau ganti kurungan 190 hari).
- **Masa Tahanan:** Dikurangkan dari total pidana.
- **Status Penahanan:** Tetap ditahan.

Terdakwa: Edward Corne

- **Status:** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Dakwaan Primer).
- **Vonis Penjara:** 10 tahun (lebih berat 1 tahun dibanding Riva dan Maya).
- **Vonis Denda:** Rp1 Miliar.
- **Ketentuan Denda:**
 - Sama dengan terdakwa lainnya (Sita aset atau ganti kurungan 190 hari).
- **Masa Tahanan:** Dikurangkan dari total pidana.

mereka sepenuhnya sependapat dengan penghitungan resmi dari BPK, namun tidak sependapat dengan hasil analisis kerugian ekonomi dari para ahli tersebut karena kurangnya pembuktian yang konkret. “Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, unsur merugikan keuangan negara dinyatakan telah terpenuhi,” tambahnya.(wid,ant/dya)

TAHUN KEDUA BUPATI RIJANTO DAN WABUP BEKY PIMPIN KABUPATEN BLITAR, FOKUS AKSELERASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BLITAR - Tahun kedua memimpin Kabupaten Blitar, Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdihansah, akan fokus mengakselerasi pembangunan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Bupati Blitar, Rijanto dalam setahun awal kepemimpinannya telah memulai perubahan yang nyata untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang Berdaya dan Berjaya.

"Keberdayaan inilah yang saat ini saya dan Wakil Bupati Mas Beky lakukan," tutur Bupati Rijanto.

Dijelaskan Bupati Blitar yang tepat setahun memimpin Bumi Penataran pada 20 Februari 2026 ini, berdaya untuk melakukan serta menjalankan program-program yang pro terhadap masyarakat Kabupaten Blitar.

"Tak lupa kami juga ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar, yang telah memberikan amanah kepada kami untuk bekerja dalam memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat Kabupaten Blitar," jelasnya.

Oleh karena itu, ditambahkan Bupati Rijanto, insyaAllah kedepan akan lebih meningkatkan kinerja dan keberdayaan dalam menjalankan roda kepemimpinan ini, sehingga bisa berjaya bersama untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blitar.

Menghadapi Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Pemkab Blitar juga memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan stok, serta pelaksanaan pasar murah di sejumlah titik.

Selain itu, kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dan penguatan aspek keamanan terus dilakukan melalui sinergi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait.



Bupati Blitar, Rijanto (kanan) dan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah (kiri).

Sementara itu, Wabup Blitar Beky Herdihansah menambahkan jika pembangunan infrastruktur memang menjadi fokusnya pada tahun pertama mendampingi Bupati Rijanto.

"Dalam setahun terakhir, Pemkab Blitar berfokus pada program penguatan infrastruktur, transformasi pelayanan publik, serta pengembangan sektor ekonomi" ungkapnya

Pada bidang infrastruktur, percepatan peningkatan kualitas jalan kabupaten, perbaikan jaringan irigasi, hingga penataan fasilitas publik terus dilakukan guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pemetaan pembangunan.

Kemudian sektor pelayanan publik, transformasi digital mulai diterapkan secara bertahap. Sistem pelayanan yang sebelumnya manual, kini didigitalisasikan untuk mempercepat proses, mengurangi birokrasi berbelit, serta guna meningkatkan transparansi dan memudahkan untuk diakses masyarakat.

"Sementara itu pada sektor ekonomi, memprioritaskan dukungan

terhadap UMKM dan pertanian. Penguatan akses permodalan, perluasan akses pasar, serta pembinaan berkelanjutan terus dioptimalisasikan. UMKM dianggap sebagai tulang punggung ekonomi daerah dan sektor pertanian sebagai identitas sekaligus kekuatan utama Kabupaten Blitar," terang Wabup Beky.

Langkah selanjutnya, Pemkab Blitar menargetkan penguatan hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperkuat ketahanan dan swasembada pangan.

"Pembangunan yang dijalankan tidak hanya berorientasi jangka pendek, melainkan sebagai warisan berkelanjutan bagi generasi mendatang," imbuhnya.

Guna merealisasikan program pembangunan pada awal 2026 ini, Bupati Rijanto telah melakukan survei 6 titik strategis fasilitas umum (fasum) di Kabupaten Blitar pada awal minggu ini, untuk penataan ibu kota dan jalur wisata religi berjalan selaras.

Beberapa titik yang disurvei hari ini antara lain, Makam Syech Subakir di Kecamatan Nglegok, Pedestrian di

Area RTH Wlingi, Telaga Blumbangede di Desa Soso, Sanggar Pusaka Gong Kyai Pradah di Alun-Alun Lodoyo, Eks Pasar Kanigoro dan Pedestrian di Area playground Alun-alun Kanigoro.

Dalam survei lapangan ini, Bupati Rijanto memastikan program pembangunan yang akan dilaksanakan, mulai dari pelebaran pedestrian yang menjadi akses ke Puskesmas Kanigoro. Hingga dukungan hibah, untuk penyelesaian Masjid Syech Subakir yang menjadi salah satu titik singgah wisatawan religi di Kabupaten Blitar.

"Dengan adanya pembangunan masjid ini, nantinya akan menjadi suatu wisata religi yang dapat dikunjungi ketika wisatawan datang ke Blitar. Tentunya apabila ini nanti bisa terlaksanakan, saya juga berharap mampu menggerakkan roda perekonomian di sekitar area masjid Syech Subakir ini. Sehingga rakyat Kabupaten Blitar akan semakin berjaya," paparnya saat meninjau pembangunan Masjid Syech Subakir.

Selain itu, Bupati Rijanto dengan didampingi OPD terkait Pemkab Blitar juga meninjau lokasi pasar lama Kanigoro, yang selama ini mangkrak tanpa ada perencanaan sama sekali.

Aset ini sangat disayangkan apabila tidak dapat dikembangkan dengan baik, sehingga Pemkab Blitar merencanakan akan membangun Taman Ikonik yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar.

"Tidak hanya nuansa taman yang asri saja, namun nanti akan kita sediakan food court untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Blitar. Semoga niatan baik ini nantinya dapat support penuh dari masyarakat dan juga legislatif, sehingga bisa secepatnya dimulai pembangunannya," pungkasnya. (* /Ais/Dya)

Suspek Campak di Indonesia Melonjak 3 Kali Lipat

Kasus campak kembali menjadi perhatian setelah Australia mengonfirmasi temuan kasus impor dari Indonesia. Seorang pelaku perjalanan berusia 18 tahun dilaporkan mengalami ruam, memicu kekhawatiran bahwa jumlah kasus di dalam negeri bisa lebih besar dari yang tercatat.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Andi Saguni, tren suspek campak memang menunjukkan kenaikan dalam tiga tahun terakhir, terutama jika membandingkan laporan bulan Januari dari tahun ke tahun.

"Memang terjadi kenaikan jumlah

kasus, dan kita bandingkan year on year lebih tinggi di Januari 2026. Februari belum bisa kita nilai, tapi kalau sampai 23 Februari, angkanya mudah-mudahan tidak tinggi karena baru 1.164," ujar Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Data Kemenkes menunjukkan pada Januari 2024 terdapat sekitar 2.000 kasus suspek. Angka itu naik menjadi 5.000 kasus pada Januari 2025, lalu melonjak menjadi 7.060 kasus pada Januari 2026—lebih dari tiga kali lipat dalam kurun tiga tahun.

"Namun poinnya di sini kita memang harus tetap aware dengan peningkatan kasus di bulan Januari,

termasuk kasus-kasus di beberapa bulan terakhir 2025," tegasnya.

Sepanjang 2025, tercatat 116 Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang tersebar di 89 kabupaten/kota di 16 provinsi. Total kasus suspek mencapai 63.760, dengan 11.094 kasus terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium.

Dari keseluruhan kasus tersebut, terdapat 69 kematian. Angka kematian atau case fatality rate (CFR) tercatat 0,1 persen. "CFR kita 0,1 persen, itu sama dengan negara-negara maju seperti Eropa dan lainnya," kata Andi.

Lima provinsi dengan KLB terbanyak sepanjang 2025 adalah

Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut merespons meningkatnya kasus campak di Australia yang menjadi sorotan publik. Ia menilai kenaikan ini bukan hanya terjadi di satu negara. "Campak itu naik di seluruh dunia sekarang ya. Di Indonesia juga ada kenaikan," ujar Budi di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan situasi baik di dalam negeri maupun di kawasan. Penguatan surveilans dan respons cepat dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih luas. (wid,ist,kum/dya)

Gandeng Swasta

Tata Kabel Udara, Pemkot Batu Kebut Regulasinya

BATU- Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menyiapkan penataan kabel udara di pusat kota tanpa membebani APBD. Skema kerja sama dengan pihak swasta dipilih untuk mendukung pembangunan infrastruktur kabel bawah tanah atau ducting. Hal ini sebagai solusi semrawutnya kabel yang mengganggu estetika kawasan wisata.

"Pemerintah menyediakan ruang atau aset di bawah trotoar. Untuk pembangunan ducting, itu dikerjakan oleh investor yang nantinya bekerja sama dengan para penyedia operator. Jadi tidak membebani APBD," ujar Wali Kota Batu, Nurochman, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah merampungkan Peraturan Wali (Perwal) Kota Batu tentang penataan kabel udara tersebut. Regulasi ini ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan sebagai payung hukum sebelum penataan fisik dilakukan di lapangan.

Pria yang akrab dengan sapaan Cak Nur, ini menegaskan keterlibatan investor menjadi kunci dalam proyek

tersebut. Pasalnya pembiayaan konstruksi akan ditanggung oleh pihak swasta yang bekerja sama secara bisnis dengan operator jaringan.

Dijelaskannya, sejumlah pemilik jaringan seperti PLN dan Telkom telah diajak berdiskusi terkait rencana penataan tersebut. Pada prinsipnya, kata Cak Nur, para operator menyatakan dukungan terhadap upaya penertiban kabel udara di Kota Batu. "Mereka setuju dan mendukung penataan ini," katanya.

Selama ini, kabel udara tak beraturan masih terlihat di sejumlah titik vital Kota Batu. Di kawasan Alun-alun Kota Batu, perempatan Klenteng, hingga sepanjang Jalan Sultan Agung, kabel udara tampak bertumpuk dan membentuk gulungan tebal di atas jalan.

Kondisi tersebut diakui Cak Nur cukup mengurangi kerapian wajah kota yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur ini.

"Ada sejumlah titik bekas proyek revitalisasi trotoar, kabel juga terlihat

menjuntai rendah, nyaris menyentuh tanah. Ini berpotensi membahayakan pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor," ungkapnya.

Lebih lanjut, mengenai Perwal yang tengah disusun, Pemkot Batu akan mengatur standar estetika dan keamanan jaringan utilitas. Skema penataan dengan sistem ducting, akan mewajibkan setiap operator telekomunikasi mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah.

Namun Cak Nur menegaskan penataan kabel udara tidak dapat diselesaikan secara instan. Pemerintah akan melaksanakan

Ilustrasi: Kabel udara di kawasan Kelurahan Sisir, Kota Batu. (Santi/Lentera)



proyek ini secara bertahap, dimulai dari kawasan ikonik dan pusat aktivitas wisata. "Penataan kabel ini tidak mungkin selesai dalam satu dua tahun. Kami lakukan step by step," katanya. (Santi/Dya)

Konsumsi Beras Naik 25% saat Ramadan,

Stok di Kota Malang Aman



Kota Malang dipastikan dalam kondisi aman.

"Ini sudah menjadi tren kalau Ramadan sampai dengan nanti Idul Fitri serta H+7 Idul Fitri, itu konsumsi pangan, terutama beras masih meningkat," ujar Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dispangtan Kota Malang, Elfiatur Roikhah, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, jika melihat tren beberapa tahun ke terakhir, hampir seluruh komoditas pangan mengalami kenaikan konsumsi. Untuk beras, kenaikannya tergolong signifikan. "Kalau kami melihat trennya beberapa tahun ke belakang, konsumsi hampir semua komoditi pangan pasti naik. Kenaikannya lumayan. Untuk beras sekitar 25 persen ke atas," jelasnya.

Berdasarkan data Dispangtan, konsumsi beras masyarakat di Kota Malang dalam setahun mencapai sekitar 60 ribu ton. Artinya, setiap bulan rata-rata kebutuhan beras warga berada di kisaran 5.000 ton.

Sementara itu, untuk ketersediaan saat ini, stok beras di pasar disebut masih mencukupi. "Kalau saat ini ketersediaan komoditas tersebut di pasar masih tersedia sekitar 75.667,83 ton," terang Elfiatur.

Dengan adanya tren kenaikan konsumsi tersebut, pihaknya memastikan langkah antisipasi telah dilakukan lebih awal. Sejak 23 Januari 2026, menurutnya Dispangtan telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Dispangtan juga melakukan koordinasi dengan sejumlah daerah sentra penghasil beras di Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi ke Kota Malang.

Namun demikian, Elfiatur mengakui sempat terdapat gangguan

produksi di beberapa wilayah sentra akibat serangan hama wereng, salah satunya di Banyuwangi, sehingga pasokan sempat berkurang.

Tak hanya mengandalkan distribusi dari daerah produsen, cadangan beras pemerintah juga menjadi penopang ketahanan stok. Elfiatur memastikan cadangan beras di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Malang masih mencukupi untuk kebutuhan jangka panjang.

"Di Bulog sendiri cadangan berasnya bisa untuk 10 bulan lebih, hampir satu tahun. Cadangannya sekitar 500 ton lebih. Sehingga sebenarnya stok untuk beras itu masih aman apalagi menjelang Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi," tegasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menekankan pengawasan tidak hanya berfokus pada ketersediaan stok, tetapi juga stabilitas harga di pasaran. Dispangtan, lanjutnya, terus memastikan harga beras tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET). (Santi/Dya)

MALANG- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang mencatat adanya tren kenaikan konsumsi beras selama Ramadan hingga Idul Fitri. Berdasarkan pola beberapa tahun terakhir, peningkatan konsumsi tersebut bisa mencapai sekitar 25 persen dibandingkan bulan-bulan biasa. Meski demikian, stok beras di

TUNJUK PUTRINYA JADI DIRJEN RUDAL KORUT, KIM JONG UN TAMBAH SENJATA NUKLIR

Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, melangkah lebih jauh dalam konsolidasi kekuasaan dinasti dan penguatan arsenal militernya. Di satu sisi, ia disebut menunjuk putrinya yang masih belia--13 tahun-- sebagai direktur jenderal administrasi rudal. Di sisi lain, ia menegaskan komitmen memperluas dan memperkuat kekuatan nuklir nasional, sembari membuka peluang hubungan dengan Amerika Serikat dengan syarat tertentu. Meski demikian, Korut tetap bersikap keras terhadap Korea Selatan (Korsel).

Laporan media Korea Selatan, Chosun Daily, dikutip Kamis (26/2/2026) menyebut Kim Ju Ae--yang diyakini berusia 13 atau 14 tahun--telah bertindak sebagai "direktur jenderal (dirjen) rudal".

Mengutip sumber pemerintah tingkat tinggi yang mengetahui persoalan tersebut, media itu menyatakan badan intelijen Korea Selatan memperoleh laporan bahwa putri Kim telah diangkat ke posisi tersebut.

Secara formal, jabatan direktur administrasi rudal masih tercatat atas nama Jang Chang-ha. Namun, menurut informasi intelijen yang dikutip, Kim Ju Ae menerima pengarahannya dari para jenderal dan mengeluarkan perintah-perintah.

Media pemerintah Korea Utara



Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un didampingi putrinya, Kim Ju Ae, dalam sebuah acara militer di Pyongyang. (KCNA.S/Dok)

pertama kali mengonfirmasi keberadaan Ju Ae pada November 2022. Saat itu ia hanya diperkenalkan sebagai "anak kesayangan" ketika mendampingi ayahnya dalam peluncuran rudal balistik antarbenua

Hwasong-17. Hingga kini, Pyongyang belum pernah mengungkapkan namanya secara resmi.

Sejak kemunculan publiknya, Ju Ae kerap hadir dalam agenda-agenda strategis. Mulai dari memantau

peluncuran rudal balistik antarbenua, inspeksi senjata, hingga kongres partai. Dalam salah satu foto yang dirilis media pemerintah, ia tampak mengunjungi Istana Matahari Kumsusan bersama kedua orang tuanya dan sejumlah pejabat. Kunjungan itu mempertegas spekulasi mengenai suksesi kepemimpinan.

Langkah tersebut beriringan dengan penegasan Kim soal arah kebijakan pertahanan. Dalam pidato di Kongres Kesembilan Partai Buruh Korea, ia menyatakan, "Merupakan tekad kuat partai kita untuk lebih memperluas dan memperkuat kekuatan nuklir nasional kita, dan sepenuhnya menjalankan status kita sebagai negara nuklir."

Ia menambahkan, "Kita akan fokus pada proyek-proyek untuk meningkatkan jumlah senjata nuklir dan memperluas sarana operasional nuklir," seperti dilaporkan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) dan dikutip Reuters serta Al Arabiya.

Menurut perkiraan lembaga think tank Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tahun lalu, Korea Utara telah merakit sekitar 50 hulu ledak, memiliki cukup bahan fisil untuk memproduksi hingga 40 hulu ledak lagi, serta mempercepat produksi bahan fisil lebih lanjut.

KCNA melaporkan Kim juga memaparkan rencana pengembangan rudal balistik antarbenua yang lebih kuat. Termasuk yang dapat diluncurkan dari bawah air, sistem serangan berbasis kecerdasan buatan, dan senjata yang mampu menyerang satelit musuh.

Ia juga menetapkan persyaratan bagi rudal balistik antarbenua yang bisa diluncurkan dari kapal selam serta memperluas persenjataan nuklir taktis, seperti artileri dan rudal jarak pendek, yang dapat menargetkan Korea Selatan.

Kongres partai ditutup dengan parade militer di Pyongyang. Foto-foto media pemerintah memperlihatkan formasi tentara berbaris di Lapangan Kim Il Sung yang terang benderang. Di podium, Kim berdiri bersama Ju Ae dan para pejabat senior. Sejumlah pasukan mengenakan kamuflase dan perlengkapan perang khusus, sementara jet tempur melakukan atraksi terbang rendah.

Di tengah konsolidasi militer itu, Kim memberi sinyal terbuka kepada Washington. "Jika [Washington] menghormati status negara kita saat ini sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan menarik kebijakan permusuhan, tidak ada alasan kita tak bisa berteman dengan baik dengan Amerika Serikat," kata Kim dalam kongres partai, seperti dikutip Al Jazeera. (jaz,rtr,cho,ist/dya)

Korsel-UEA Perkuat Aliansi Pertahanan Senilai US\$35 M



Kapal selam angkatan laut ROK Lee Beom-seok (SS-II) mengambil bagian dalam peninjauan armada angkatan laut di pantai Busan, Korea Selatan, 26 September 2025. (Reuters.dok)

KOREA Selatan dan Uni Emirat Arab (UEA) memperdalam kemitraan strategisnya. Di bidang pertahanan, kedua negara meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan nilai potensi lebih dari US\$35 miliar. Di sektor teknologi dan energi, kolaborasi diperluas dari kecerdasan buatan hingga nuklir sipil dan cadangan minyak.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan kebijakan tersebut memang menutup

peluang sebagian eksportir yang selama ini membidik pasar Arab Saudi. Namun, kontribusi komoditas unggas dan telur terhadap total ekspor Indonesia ke negara itu relatif kecil.

"Eksportir ayam, unggas, atau telur pasti selama ini berharap memasuki pasar Arab Saudi kehilangan peluang, meskipun nilainya mungkin relatif kecil dibanding total ekspor nasional kita atau ekspor lainnya," kata Toto, Rabu (25/2/2026).

Menurut Toto, dampak paling

terasa justru pada eksportir kecil dan menengah yang menargetkan pasar Timur Tengah. Permintaan berpotensi berkurang atau tertunda, terutama menjelang musim haji, periode ketika kebutuhan pangan meningkat.

Ia menjelaskan, pembatasan terhadap produk segar mendorong pelaku usaha mengalihkan strategi ke produk olahan seperti telur bubuk atau produk yang telah dipasteurisasi. Opsi ini memungkinkan komoditas tetap memenuhi standar suhu dan kesehatan yang ditetapkan otoritas Saudi, tetapi memerlukan investasi tambahan.

"Bagi pelaku usaha yang sudah investasi ekspor, mereka akan menghadapi tekanan ekonomi karena tidak mendapat akses ke pasar Saudi," ujarnya.

Kendati demikian, GPEI menilai larangan tersebut tidak signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan. Ekspor Indonesia ke Arab Saudi nilainya mencapai lebih dari US\$2 miliar, namun komoditas unggas dan telur bukan kategori utama. (wif,bis/dya)

Ketahui Jenis-jenis Stretch Mark dan Cara Menyamarkannya

Selain dibantah oleh para ilmuwan, klaim hilangnya gravitasi selama 7 detik ini juga menambah daftar panjang hoaks sains yang kerap muncul di ruang digital. Pola penyebarannya cenderung sama, yakni memanfaatkan momen langka dalam astronomi untuk menarik perhatian publik, lalu dibumbui narasi konspirasi seolah-olah ada informasi besar yang sengaja ditutupi oleh lembaga resmi seperti NASA.

Para pakar literasi digital mengingatkan agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi informasi viral, terutama yang mengatasnamakan sains dan lembaga penelitian. Memeriksa sumber, membaca klarifikasi dari media tepercaya, serta merujuk pada penjelasan ilmiah dapat membantu mencegah kepanikan yang tidak perlu.

Di era media sosial, satu unggahan sensasional bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasinya, sehingga kebiasaan mengecek fakta menjadi kunci penting untuk menjaga ketenangan publik. Stretch mark menjadi salah satu perubahan kulit yang kerap dialami perempuan selama masa kehamilan. Seiring pertumbuhan janin, ukuran perut akan semakin membesar dan membuat kulit meregang dalam waktu relatif singkat. Proses peregang inilah yang memicu munculnya guratan-guratan halus di permukaan kulit.

Tak hanya di perut, stretch mark juga umum ditemukan di area paha, payudara, hingga pinggul. Dalam istilah medis, kondisi ini dikenal sebagai striae. Meski tidak berbahaya dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan serius, keberadaannya sering kali membuat sebagian ibu merasa kurang percaya diri. Kabar baiknya, stretch mark tetap bisa dirawat sesuai jenis dan fasenya agar tampak lebih samar.

Perbedaan Stretch Mark Merah dan Putih

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr. Matahari Arsy, Sp.KK, menjelaskan bahwa secara medis stretch mark terbagi menjadi dua jenis utama, yakni striae rubra dan striae alba.

Striae Rubra (Merah)

Striae rubra merupakan stretch mark yang masih baru muncul. Pada fase ini, guratan terlihat berwarna merah, merah muda, atau keunguan. Warna tersebut muncul karena masih adanya proses peradangan serta aktivitas pembuluh darah di lapisan kulit. Ciri-cirinya striae rubra adalah berwarna kemerahan, pink, atau keunguan.

Terkadang munculnya disertai rasa gatal ringan. Pada fase ini perawatan cenderung mudah dan lebih baik karena masih dalam fase awal, perawatan dinilai lebih efektif karena jaringan kulit belum mengalami perubahan permanen.

Striae Alba (Putih)

Sementara itu, striae alba adalah stretch mark yang sudah memasuki fase lanjut. Warnanya tampak lebih pucat atau putih karena proses peradangan telah mereda dan jaringan kulit mengalami perubahan struktur. Ciri-ciri dari stretch mark striae alba adalah berwarna putih atau lebih terang dari warna kulit (pada sebagian orang bisa tampak lebih gelap), tekstur kulit menjadi tipis dan tampak sedikit cekung. Pada fase ini, perawatan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama karena stretch mark tidak bisa dihilangkan sepenuhnya.

Perawatan yang Dapat Dilakukan

Menurut dr. Matahari, stretch mark tidak bisa hilang total, namun dapat dibuat lebih samar baik dari segi warna maupun tekstur. Beberapa langkah perawatan yang dapat dilakukan antara lain:

Menggunakan pelembap secara rutin

Pelembap membantu menjaga elastisitas dan hidrasi kulit, sehingga kulit lebih lentur saat mengalami peregangan.

Konsultasi ke dokter untuk tindakan medis tertentu

Terapi seperti laser maupun prosedur regeneratif seperti secretome atau salmon DNA dapat

dipertimbangkan sesuai kondisi kulit dan indikasi medis.

Menerapkan pola hidup sehat dan asupan gizi seimbang

Konsumsi protein, vitamin C, vitamin E, serta zinc berperan dalam mendukung pembentukan kolagen dan menjaga kesehatan kulit secara menyeluruh.

Terkait konsumsi kolagen, dr. Matahari menekankan bahwa asupan nutrisi yang cukup dari makanan tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas kulit. "Perubahan berupa pemudaran warna atau perbaikan tekstur biasanya mulai terlihat setelah 1-2 bulan dengan perawatan yang konsisten," ujarnya beberapa waktu lalu.

Meski demikian, hasil perawatan dapat berbeda pada setiap individu, tergantung pada kondisi kulit, usia, hingga faktor genetik. (Inna – UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)

Gravitasi Bumi Bakal Hilang 7 Detik di 12 Agustus, Benarkah?

Dunia maya kembali digemparkan oleh sebuah narasi yang memicu kepanikan massal, kali ini berpusat pada klaim bahwa gravitasi Bumi akan lenyap selama 7 detik tepat pada tanggal 12 Agustus 2026.

Kabar itu menyebar luas, terutama melalui platform video pendek seperti TikTok dan Instagram. Membuat warganet bertanya-tanya tentang kebenaran dari fenomena kosmik yang terdengar mustahil ini.

Narasi yang beredar menyebutkan bahwa peristiwa ini telah diketahui oleh Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), namun sengaja dirahasiakan dari publik.

Klaim yang beredar ini menggambarkan sebuah skenario dramatis yaitu selama 7 detik tersebut, semua benda, termasuk manusia dan hewan yang tidak terikat, akan mulai melayang, mencapai ketinggian hingga 20 meter di udara. Sebelum akhirnya jatuh kembali ke tanah secara tiba-tiba.

Kabar ini pertama kali diendus oleh situs pemeriksa fakta internasional, Snopes, yang melacak sumbernya dari unggahan media sosial yang kini sudah dihapus.

Unggahan tersebut mengaitkan tanggal 12 Agustus 2026 dengan dokumen rahasia yang konon bocor, bernama "Project Anchor," yang disebut-sebut memiliki

anggaran fantastis hingga US\$ 89 miliar. Inilah yang menjadi alasan mengapa isu ini muncul dan menjadi viral, memanfaatkan ketertarikan publik terhadap teori konspirasi dan misteri luar angkasa.

Tanggal yang dipilih untuk klaim ini, 12 Agustus 2026, bukannya tanpa sebab. Waktu tersebut bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari total yang dapat disaksikan di beberapa wilayah. Mulai dari Arktik hingga Spanyol. Fenomena astronomi yang langka dan spektakul

er ini seringkali menjadi pemicu spekulasi liar dan rumor bertema kiamat di internet.

Namun, para ilmuwan menegaskan menghubungkan gerhana, yang merupakan peristiwa optik, dengan hilangnya gaya fundamental seperti gravitasi adalah kekeliruan fatal. "Satu-satunya cara untuk menghentikan gravitasi adalah dengan menghilangkan massa Bumi itu sendiri. Klaim ini secara fundamental menantang hukum fisika

yang kita kenal," demikian ringkasan dari laporan IFLScience yang mengutip penjelasan para ahli.

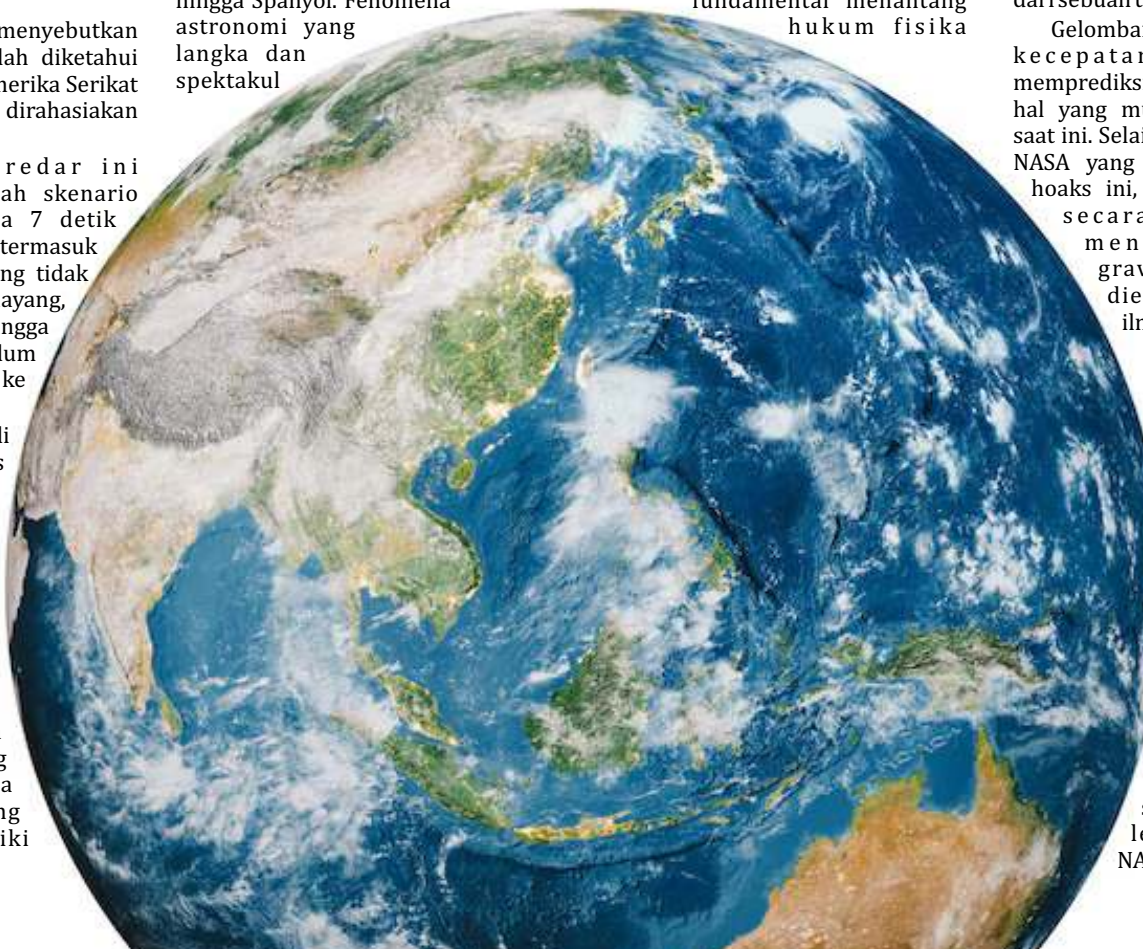
Narasi viral juga mencoba mengaitkan hilangnya gravitasi dengan gelombang gravitasi yang berasal dari tabrakan lubang hitam.

Namun, penjelasan ini juga keliru. Gelombang gravitasi yang terdeteksi oleh instrumen super sensitif seperti LIGO-Virgo-KAGRA sangatlah lemah dan hanya mewakili detik-detik akhir dari sebuah tabrakan kosmik.

Gelombang ini bergerak dengan kecepatan cahaya, sehingga memprediksinya jauh-jauh hari adalah hal yang mustahil dengan teknologi saat ini. Selain itu, perlu dicatat bahwa NASA yang namanya dicatut dalam hoaks ini, bukanlah lembaga yang secara spesifik bertugas mengamati gelombang gravitasi, tugas tersebut diemban oleh kolaborasi ilmiah internasional.

Selain dibantah oleh para ilmuwan, klaim hilangnya gravitasi selama 7 detik ini juga menambah daftar panjang hoaks sains yang kerap muncul di ruang digital.

Pola penyebarannya cenderung sama, yakni memanfaatkan momen langka dalam astronomi untuk menarik perhatian publik, lalu dibumbui narasi konspirasi seolah-olah ada informasi besar yang sengaja ditutupi oleh lembaga resmi seperti NASA. (ist/dya)



HARIAN
LETERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LETERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG:** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Yang Sedang Viral, Gamis 'Bini Orang' Diburu untuk Lebaran

Tren busana lebaran 2026 mulai terlihat sejak awal Ramadan. Di sejumlah pusat perbelanjaan busana muslim, model yang dijuluki 'gamis bini orang' menjadi buruan pembeli. Model ini viral di media sosial dan disebut-sebut sebagai salah satu tren untuk lebaran tahun ini.

Gamis bini orang merujuk pada model gamis dengan potongan longgar namun tetap berbentuk siluet tubuh

secara elegan. Ciri khasnya terletak pada desain yang sederhana tapi terkesan mewah, dengan pilihan warna lembut seperti broken white, dusty pink, mocca, hingga baby blue. Beberapa model dilengkapi detail lipit halus, aksesoris layer, cutting A-line, serta bahan jatuh seperti ceruty premium, satin silk, dan crinkle airflow.

Desain gamis bini orang ini jauh dari kesan ramai tanpa payet, tanpa shimmer, tanpa detail ramai. Detail kecil seperti kerah shanghai, lengan balon, atau tambahan belt ramping menjadi pemanis tanpa menghilangkan kesan anggun.

Gamis ini memunculkan kesan matang, anggun, dan elegan. Gaya yang identic dengan sosok ibu-ibu muda atau wanita dewasa yang ingin tampil rapi tanpa terlihat berlebihan saat silaturahmi.

Istilah bini orang sendiri disebutkan muncul dari tren percakapan di media sosial yang menggambarkan tampilan perempuan yang terlihat lebih matang, elegan, dan berwibawa. Meski terdengar unik, penyebutan tersebut merujuk pada gaya berpakaian yang kalem dan sophisticated.

Ada sedikitnya tujuh model gamis "bini orang" yang menjadi tren Lebaran 2026.

Brokat Full Depan

Model klasik dengan brokat menutupi seluruh bagian depan. Desain sederhana namun tampak mewah, sering dipadukan warna pastel dengan potongan lurus yang nyaman dipakai sepanjang hari. Bahan umumnya katun atau crepe ringan, mudah dipadukan dengan berbagai jenis hijab dan cocok untuk semua usia.

Brokat Lengkung Kontras

Mengusung potongan brokat melengkung dengan warna berbeda dari kain utama. Kontras warna memberi kesan modern sekaligus membuat proporsi tubuh terlihat lebih seimbang. Kombinasi warna seperti sage dan cream banyak diminati untuk tampilan elegan saat silaturahmi.

A-Line Minimalis

Memiliki potongan melebar di bagian bawah sehingga memberi ruang gerak lebih leluasa. Brokat tetap menjadi aksesoris utama namun tampil lebih sederhana. Desain rapi dan modern membuatnya cocok bagi pencinta gaya minimalis serta nyaman untuk aktivitas Lebaran yang padat.

Kombinasi Satin

Perpaduan brokat dan satin menghasilkan tampilan lebih mewah dengan kilau lembut. Biasanya hadir dalam warna elegan seperti champagne atau dusty pink. Tekstur satin yang halus serta potongan lurus menciptakan siluet ramping dan anggun.

Layer Brokat

Menampilkan lapisan kain dengan brokat sebagai layer luar sehingga tampak bertekstur dan flowy. Model ini memberi kesan feminin dan unik, sering dipilih untuk acara keluarga besar maupun oleh kalangan muda.

Lengan Balon

Sentuhan lengan balon memberi nuansa modern pada desain klasik.

Brokat tetap menjadi fokus utama di bagian depan, sementara siluet lengan membuat tampilan lebih stylish namun tetap sopan. Model ini banyak digemari generasi muda.

Polos dengan Aksesoris Brokat

Pilihan bagi penyuka tampilan sederhana. Brokat hanya menjadi aksesoris kecil di bagian depan sehingga desain terlihat bersih dan modern. Warna netral seperti cream atau abu menjadi favorit karena mudah dipadukan dan nyaman dipakai seharian. (Ilma - mahasiswa UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini)



Mati Lampu Nasional ...dari hal 1

Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengungkapkan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mengalami kekurangan pasokan batu bara. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu keandalan sistem kelistrikan nasional.

Dewan Pengawas APLSI, Joseph Pangalila, mengatakan penurunan pasokan sudah terjadi sejak tahun lalu. Saat ini, sebagian besar PLTU hanya memiliki cadangan batu bara untuk belasan hari operasi. Bahkan, ada yang stoknya kurang dari 10 hari.

Padahal, standar ideal untuk menjaga keandalan operasional minimal berada pada level 25 hari operasi.

"Saat ini, sebagian pembangkit memiliki stok kurang dari 10 hari, dan sebagian lainnya hanya belasan hari. Pembangkit yang mencapai 25 hari hanya tinggal beberapa saja," ujar Joseph, Kamis (26/2/2026).

Joseph menjelaskan, produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) menyumbang hampir 50 persen pasokan listrik nasional. Artinya, gangguan pasokan batu bara ke PLTU swasta berdampak langsung terhadap sistem kelistrikan nasional.

Menurut dia, sektor kelistrikan kerap menjadi prioritas terakhir dalam distribusi batu bara. Salah satu penyebabnya adalah harga domestic market obligation (DMO) untuk listrik yang lebih rendah dibanding sektor lain.

Harga DMO batu bara untuk kelistrikan ditetapkan sebesar 70 dollar AS per ton untuk kalori 6.322 kcal/kg GAR. Dengan asumsi kurs Rp 16.759 per dollar AS, nilainya sekitar Rp 1,17 juta per ton.

Sebagai perbandingan, DMO untuk industri semen dipatok 90 dollar AS per ton atau sekitar Rp 1,50 juta per ton. Sementara industri smelter mengikuti harga pasar.

"Harga DMO listrik ini juga sudah lama, sejak 2018, padahal biaya produksi batu bara terus meningkat hingga sekarang. Jadi wajar saja kalau minat suplai mereka ke kita rendah. Ada yang malah rugi karena jual ke listrik," kata Joseph.

Produksi Dipangkas, Risiko Meningkat

APLSI juga menyoroti potensi keterlambatan penerbitan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) terbaru. Sejumlah pemasok masih mengacu pada RKAB tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara nasional menjadi 600 juta ton pada 2026. Angka ini turun dari realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Menurut Joseph, kombinasi stok menipis dan produksi yang dipangkas

membuat sistem semakin rentan.

"Kalau stok pembangkit berkurang, bisa menyebabkan keandalan suplai listrik rendah dan menjadi rentan sekali. Kalau ada pembangkit yang mendadak rusak atau cuaca buruk beberapa hari sehingga pasokan batu bara terhambat, bisa saja terjadi kekurangan suplai listrik," ujarnya.

APLSI meminta pemerintah memprioritaskan pasokan batu bara untuk sektor kelistrikan agar standar minimal 25 hari operasi dapat terpenuhi.

Organisasi tersebut juga membuka opsi penyesuaian harga DMO agar pemasok memiliki insentif untuk tetap menyalurkan batu bara ke pembangkit listrik.

"Harapan kami pemerintah prioritas suplai ke IPP, kalau perlu dengan menyesuaikan harga DMO sehingga pemasok berminat untuk menyuplai ke kami," kata Joseph.

ESDM Janji Amankan Pasokan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan menjamin ketersediaan batu

bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), menyusul keluhan pengusaha soal stok yang menipis hingga level kritis.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Ditjen Minerba ESDM, Surya Herjuna, mengatakan pemerintah akan memastikan kebutuhan batu bara untuk domestic market obligation (DMO), terutama bagi sektor kelistrikan, tetap terpenuhi.

"Evaluasi itu pasti akan kita lakukan demi kepentingan negara kita terkait dengan masalah pendapatan... DMO, kebutuhan dalam negeri kita. Termasuk suplai terhadap kelistrikan. Itu juga perlu kita jamin. Jangan sampai ada HOP-HOP yang kurang dari 25 hari," ujar Surya di Jakarta.

Kondisi kritis ini tak lepas dari belum disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 untuk tambang batu bara. Di saat bersamaan, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.

Keterlambatan persetujuan RKAB dinilai membuat sejumlah pemasok berhati-hati dalam pengiriman, karena masih mengacu pada kuota tahun sebelumnya.

ESDM menyatakan akan

mengevaluasi kebijakan RKAB demi menjamin kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk kelistrikan. Pemerintah menegaskan DMO dan suplai batu bara untuk pembangkit menjadi prioritas agar keandalan listrik nasional tetap terjaga.

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) sebelumnya mengatakan hingga saat ini belum ada anggota mereka yang menerima persetujuan RKAB tahun ini. Persetujuan ini merupakan kewenangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Memang sampai hari ini belum ada (yang disetujui) dan masih proses evaluasi. Sebagian besar juga harus mengacu pada angka rekomendasi dengan pemotongan cukup signifikan," kata Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani.

Kendati demikian, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo mengatakan hingga saat ini pasokan batu bara untuk PLTU dalam kondisi aman. "Pengaruh (pemangkasan RKAB) ada, tapi atas dukungan pemerintah DMO aman," kata Rizal. (wid,ost,kim/dya)

Harga di Pasar Global Ambles 5 Hari Beruntun

HARGA batu bara belum juga bangkit setelah lima hari ambruk. Merujuk Refinitiv, harga batu bara pada perdagangan Rabu (25/2/2026) ada di posisi US\$ 117,25 atau turun 0,64%.

Penurunan tersebut memperpanjang derita harga batu bara dengan ambruk 4% dalam lima hari beruntun.

Harga batu bara belum juga membaik meski ada kabar positif dari Jepang hingga India.

Data awal dari Kementerian Keuangan Jepang menunjukkan Jepang mengimpor sekitar 15,70 juta ton batu bara pada Januari, naik 2% dibanding Januari tahun lalu. Nilai impor batu bara tersebut mencapai sekitar JPY 334,09 miliar (sekitar US\$2,14 miliar), turun sekitar 13,2% secara tahunan.

Impor dari AS melonjak sekitar 49,4% menjadi sekitar 911.000 ton, dengan nilai naik sekitar 9,3%. Impor dari Rusia meningkat tajam 258,6%, sekitar 92.000 ton, dengan nilai naik 294,7%.

Jepang juga mengimpor batu bara dari negara Asia lainnya sekitar 2,66 juta ton, naik 7,3% secara tahunan.

Meningkatnya volume impor dari beberapa negara sumber menunjukkan Jepang masih bergantung pada pasokan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan batu

bara, meski nilai totalnya turun karena harga lebih rendah atau perubahan komposisi impor.

Tren ini mencerminkan pergeseran pola pasokan dan permintaan batu bara di Jepang pada awal 2026.

Dari India dilaporkan permintaan batu bara mereka diperkirakan akan terus meningkat, terutama karena kebutuhan listrik yang tumbuh pesat.

Pertumbuhan ekonomi, ekspansi industri, dan kenaikan konsumsi listrik rumah tangga menjadi pendorong utama lonjakan kebutuhan energi berbasis batu bara.

Batu bara masih menjadi tulang punggung pembangkit listrik India, menyumbang mayoritas produksi listrik nasional, sehingga kenaikan permintaan listrik langsung meningkatkan konsumsi batu bara.

Produksi domestik India juga terus meningkat, tetapi tidak selalu cukup untuk memenuhi lonjakan permintaan, sehingga impor tetap menjadi faktor penting dalam pasokan energi negara tersebut.

Permintaan listrik meningkat seiring urbanisasi, pertumbuhan populasi, dan kebutuhan pendinginan (AC) yang lebih tinggi, terutama saat suhu ekstrem.

Kabar positif juga dilaporkan China. Sentimen pasar batu bara termal di wilayah tambang utama

China membaik pada 25 Februari, didorong oleh pemulihan permintaan secara bertahap setelah libur panjang serta harga batu bara di pelabuhan yang tetap kuat.

Permintaan dari pengguna akhir mulai kembali meningkat, sehingga harga batu bara di mulut tambang (mine-mouth) di beberapa daerah penghasil utama mengalami kenaikan atau tren menguat.

Aktivitas produksi tambang dan perdagangan juga mulai pulih seiring normalisasi operasional setelah periode libur, yang ikut memperbaiki sentimen pasar domestik. Kenaikan harga di pelabuhan juga memberi dukungan tambahan pada harga di area tambang, karena pelaku pasar melihat peluang margin lebih baik.

Namun, pasar batu bara kokas relatif stabil, dengan harga yang sebagian besar tidak berubah dalam penilaian terbaru pasar. Pelaku pasar bersikap hati-hati dan banyak memilih menunggu perkembangan berikutnya.

Kekhawatiran utama berasal dari pelemahan harga baja, yang menekan profitabilitas pabrik baja dan meningkatkan kemungkinan mereka menekan harga bahan baku, termasuk coke.

Karena tekanan dari sektor hilir tersebut, potensi pemotongan harga coke mulai diperhitungkan oleh pasar, meskipun belum terjadi secara langsung. (wid,ist,kum/dya)

MENCUAT DUGAAN INDONESIA JADI TEMPAT PEMBUANGAN PIKAP INDIA

Keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India terus memantik polemik. Teranyar, muncul dugaan bahwa Indonesia hanya dijadikan pasar pembuangan kendaraan yang tak lagi memenuhi standar emisi di negara asalnya. Diketahui, India kini telah menerapkan standar emisi Bharat Stage 6 (BS6) yang setara dengan Euro 6. Sementara Mahindra Scorpio, model yang diimpor RI masih menggunakan standar di bawahnya.

Eksekutif Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin, menyatakan India kini telah menerapkan standar emisi Bharat Stage 6 (BS6) yang setara dengan Euro 6. Sementara salah satu model yang akan masuk ke Indonesia, Mahindra Scorpio, masih menggunakan standar di bawahnya.

"Betul, kita anggap itu dumping. Karena India sudah masuk ke Euro 6," ujar Ahmad dalam konferensi pers daring, dikutip Kamis (26/2/2026).

Berdasarkan informasi di laman resmi Mahindra Indonesia, Mahindra Scorpio yang dipasarkan di Tanah Air masih berstandar BS4. Secara regulasi, spesifikasi tersebut memang masih sesuai dengan aturan emisi di Indonesia, namun tidak lagi diperbolehkan beredar di India.

Merujuk laman Transportpolicy,



Kehadiran mobil pikap impor asal India terlihat di kegiatan koperasi desa di Surabaya. (Instagram/mahindraautoglobal)

India melakukan lompatan dari BS4 langsung ke BS6 melalui aturan Automotive Industry Standard (AIS) 137 tentang Bharat Stage VI. Regulasi yang diterbitkan Kementerian Transportasi Jalan dan Jalan Raya India (MoRTH) itu berlaku nasional sejak April 2020.

Artinya, kendaraan dengan standar emisi di bawah BS6 sudah tak dapat lagi dioperasikan di India dalam enam tahun terakhir. Bahkan pada 2023, pemerintah India memperketat aturan melalui BS6 Phase 2 dengan skema Real Driving Emissions (RDE), yang menguji emisi

PERBANDINGAN HARGA PICK UP IMPOR INDIA DAN PRODUK LOKAL

Tata Yodha

- CNG: 977.885 rupee (Rp 180,91 juta)
- Diesel: 1.044.806 rupee (Rp 193,29 juta)

Mahindra Scorpio Pick Up

- Single Cabin ditawarkan Rp 278 juta
- Double Cabin setara Rp 318 juta

Isuzu Traga

- Flat Deck: Rp 283 juta
- Box Semi Aluminium: Rp 324 juta
- Box Full Aluminium: Rp 330 juta

Mitsubishi L300

- Pikap Flat Deck: Rp 241,6 juta
- Cab Chassis: Rp 239,1 juta

Suzuki Carry

- Mulai Rp 170 jutaan

Granmax Pick Up

- Rp 167 juta

Isuzu Traga Pick Up

- Harga antara Rp 295-297 juta per unit

kendaraan dalam kondisi nyata di jalan, bukan sekadar di laboratorium. Dengan kebijakan tersebut, kendaraan yang dijual di India dituntut semakin ramah lingkungan.

Ahmad mengibaratkan situasi ini seperti barang mendekati masa kedaluwarsa yang dijual murah. "Barang busuk, wajar kalau diobral. Kita lihat di pasar atau supermarket, kalau ada kue basah dijual sore hari harganya didiskon karena akan kedaluwarsa. Konteksnya kurang lebih seperti itu," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, telah dihubungi untuk dimintai klarifikasi atas dugaan tersebut. Meski membalas pesan singkat, ia tidak memberikan jawaban substantif atas pertanyaan yang diajukan.

Sebagai informasi, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor total 105 ribu kendaraan niaga dari dua produsen otomotif India, Mahindra dan Tata Motors, untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih.

Nilai kontrak pengadaan tersebut mencapai Rp 24,66 triliun. Rinciannya, 35 ribu unit Scorpio Pick-Up akan dipasok Mahindra. Sementara 70 ribu unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35 ribu unit Yodha Pick-Up dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck. (wid ist,dto/dya)

Legislator Tegaskan Tak Pernah Dibahas di DPR

SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyatakan dukungannya terhadap penundaan rencana impor mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih. Ia menegaskan pengadaan kendaraan tersebut tidak pernah dibicarakan secara detail di DPR.

Menurut Herman, sebelumnya Agrinas Pangan Nusantara selaku mitra kerja Komisi VI memang sempat memaparkan rencana alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk setiap desa. Rinciannya, Rp 1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan gedung, Rp 500 juta untuk modal kerja, dan sisanya diperuntukkan bagi sarana dan prasarana, termasuk transportasi.

Namun, kata dia, tidak pernah dijelaskan jenis maupun spesifikasi kendaraan yang dimaksud.

"(Agrinas) tidak pernah menyebutkan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa," ujar Herman di kompleks parlemen,

Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Ia mengaku baru mengetahui rencana impor tersebut dari pemberitaan media. Disebutkan ada pengadaan masing-masing 35 ribu unit untuk tiga jenis kendaraan sehingga total mencapai 105 ribu unit, dengan nilai anggaran sekitar Rp 24,66 triliun.

Herman menegaskan pengadaan ratusan ribu kendaraan dengan nilai anggaran sebesar itu semestinya dibahas lebih dulu bersama DPR. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

"Ini anggaran besar sekali, semestinya dibahas dulu di DPR dan untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, semestinya juga ini terbuka kepada publik," katanya.

Berisiko Rugikan Negara

Direktur Ekonomi Digital Celios (Center of Economic and Law Studies), Nailul Huda, menilai kebijakan impor 105.000 mobil pikap dari India

berpotensi merugikan negara dan industri dalam negeri. Ia bahkan mencurigai adanya pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan dari proyek tersebut.

Menurut Huda, kebijakan ini jelas tidak berpihak pada penguatan industri nasional maupun perekonomian desa. Ia menilai langkah tersebut justru lebih menguntungkan pihak tertentu.

"Importasi mobil dan pikap oleh Agrinas dari India semakin menunjukkan bahwa proyek ini bukan untuk ekonomi nasional, apalagi ekonomi di tingkat desa, melainkan ekonomi Agrinas dan para oligarki pemerintah," kata Huda di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Nilai pengadaan kendaraan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih itu mencapai Rp 24,66 triliun. Huda menilai dana sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong industri otomotif nasional agar lebih berkembang dan memberi dampak berantai terhadap perekonomian. (tin,ant,ist/dya)